

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Gerakan mahasiswa telah menjadi fenomena penting dalam reformasi politik yang terjadi di Indonesia tahun 1998. Namun sesungguhnya, Indonesia memiliki sejarah panjang terhadap keterlibatan mahasiswa dalam politik nasional. Tahun 1966 misalnya, gerakan mahasiswa yang saat itu berada di bawah naungan Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI), berada di garis depan menentang Soekarno dan PKI dengan meneriakkan panji "Tritura".¹

Naiknya Soeharto menuju kekuasaan memang mendapat dukungan organisasi-organisasi mahasiswa. Tetapi sejak awal 1970-an mereka kembali berada di jalur menentang rezim Orde Baru. Protes-protes mahasiswa pada tahun 1974 dan 1978 merupakan kasus yang paling signifikan. Yang paling terkenal adalah demonstrasi dan kerusuhan yang terjadi 15 Januari 1974, yang disusul kemudian dengan ditangkapnya sejumlah aktivis mahasiswa seperti Hariman Siregar dan Syahrir.² Keterlibatan para aktivis mahasiswa dalam isu-isu politik dengan mengambil posisi oposisi, telah menjadikan mereka sebagai kekuatan politik tersendiri. Sehingga menghadapi kelompok ini, tak jarang pemerintah mengambil sikap subversip.

¹ Arbi Sanit, *Sistem Politik Indonesia: Kestabilan, Peta Kekuatan Politik, dan Pembangunan*, Jakarta, Rajawali Pers, 1981, hal. 87.

² Peristiwa ini kemudian dikenal dengan peristiwa "Malari" (Malapetaka 15 Januari). Baca Suharsih & Ign Mahendra K, *Gergerak Bersama Rakyat: Sejarah Gerakan Mahasiswa dan Pembangunan Sosial, Politik, dan Budaya*, Bandung, 2007, hal. 22.

Menurut Arbi Sanit, ada dua hal yang melatar belakangi aktivitas politik mahasiswa:³ *Pertama*, secara internal, karena adanya kombinasi dari pemahaman mahasiswa ini terhadap realitas sosial ekonomi yang sedang terjadi, serta kekhawatiran akan masa depan yang membangkitkannya untuk menentukan penilaian, sikap, dan gerakan kolektif. Di samping itu, latar belakang sosial mereka yang kebanyakan berasal dari lapisan menengah, memungkinkan mahasiswa untuk cenderung mandiri terhadap struktur kekuasaan.

Kedua, secara eksternal, karena adanya kombinasi dari pemusatan kekuasaan yang berlebihan dengan kegagalan lembaga-lembaga politik untuk menaikkan fungsinya sebagai pelindung dan pemenuh kepentingan masyarakat luas, mendorong mahasiswa yang cukup sarat dengan idealisme untuk tampil sebagai kekuatan kontrol dan korektif.

Pada tahun 1978 terjadi pergeseran gerakan politik mahasiswa dengan dikeluarkannya kebijakan NKK/BKK (Normalisasi Kehidupan Kampus/Badan Kordinasi Kemahasiswaan) oleh pemerintah Orde Baru. Mahasiswa dilarang melakukan aktivitas politik dalam bentuk apapun di dalam kampus. Hal ini kemudian membuat mahasiswa mulai membentuk forum-forum lain di luar kampus, seperti kelompok studi dan LSM. Kelompok-kelompok studi inilah yang kemudian berperan penting terhadap diaspora ide-ide radikal, seperti Marxisme, feminisme, Islam radikal, serta teori pembebasan.⁴

³ Baca Arbi Sanit, *Mahasiswa, Kekuasaan dan bangsa: Refleksi dan Gagasan Alternatif*, Jakarta, Lingkaran Studi Indonesia dan LBH, 1989, hal. 104.

⁴

Periode akhir 1980-an dan awal 1990-an, para mahasiswa mulai menyuarakan isu hak asasi manusia dan ketimpangan sosial. Walaupun gerakan mereka belum bisa didasarkan atas analisis kelas Marxian secara utuh, namun tersebarnya buku-buku berhaluan “kiri” ikut mempengaruhi modus gerakan mereka. Selain itu terdapat pula pengaruh Islam radikal yang kuat terhadap gerakan mahasiswa, khususnya di kalangan mahasiswa muslim.

Anders Uhlin membagi aktivis mahasiswa Indonesia tahun 1990-an ke dalam tiga kategori utama berdasarkan ideologi mereka: (1) kelompok yang menggunakan wacana Marxis (tetapi tetap tanpa kekerasan dan demokratis); (2) kelompok populis-kiri yang terlibat dalam demonstrasi-demonstrasi dan kampanye *high-profile*; dan (3) kelompok Muslim.⁵

Periode ini melahirkan gelombang baru demonstrasi mahasiswa. Di mana demokrasi dan hak asasi manusia menjadi kata kunci aksi. Dalam sebuah kajian tentang pembangkangan mahasiswa pada 1980-an di Indonesia, Aspinall mengumpulkan laporan tentang 155 demonstrasi mahasiswa dalam periode 1987-1990.⁶ Berbeda dengan protes-protes mahasiswa pada 1970-an yang terfokus pada isu-isu nasional, generasi ini lebih berkonsentrasi pada isu-isu lokal, seperti nasib petani, buruh, nelayan, dan rakyat miskin lainnya, serta memprotes kasus-kasus seperti korupsi. Di awal 1990-an, mahasiswa mulai melemparkan isu yang sangat sensitif, yaitu: “Seret Presiden ke hadapan siding sitemewa MPR!”. Namun demonstrasi yang dilakukan tetap mendapatkan tekanan kuat dari *state apparatus*.

⁵ *Ibid.*, hal. 112.

⁶ Edward Aspinall, *Student Dissent in Indonesia in the 1980s*, Clayton, Victoria, Centre of

Kekuatan politik gerakan mahasiswa menemukan momentumnya pada tahun 1998. Dengan mengandalkan kekuatan konsolidasi dalam barisan massa, mahasiswa mampu memaksa Soeharto turun dari kekuasaannya sekaligus mengakhiri rezim Orde Baru. Gerakan mahasiswa kemudian lahir sebagai sebuah kekuatan penting sekaligus salah satu instrumen dalam sistem demokrasi. Gerakan ini juga ikut andil dalam menurunkan Presiden Abdurrahman Wahid tahun 2001, yang mereka anggap setengah hati menegakkan demokratisasi, dengan memaksa MPR mengadakan Sidang Istimewa.⁷ Meminjam istilah Uhlin, gerakan mahasiswa bisa dibidang telah lahir menjadi salah satu aktor pro-demokrasi dalam sistem politik Indonesia. Di mana ia akan selalu menjadi kekuatan oposisi terhadap rezim anti demokrasi.

Jika dalam politik nasional, gerakan mahasiswa ikut menentukan perubahan politik, bagaimana halnya dengan politik internasional? Serta seperti apa artikulasi gerakan mahasiswa dalam kebijakan luar negeri Indonesia?

Wacana demokrasi gelombang ketiga yang melanda sebagian besar belahan dunia pada akhir 1980-an dan awal 1990-an, sebagaimana tesis Samuel Huntington (1991), serta transisi demokrasi yang diwacanakan Guillermo O'Donnell dan Philippe C Schmitter (1993), ikut mempengaruhi partisipasi dan arah gerakan mahasiswa dalam politik nasional—begitu juga politik internasional. Namun dalam kasus Indonesia keran demokrasi, yang memungkinkan mahasiswa bebas menyuarakan pendapat, baru terbuka lebar pasca reformasi politik 1998. Walaupun sebelumnya juga terjadi demonstrasi, namun mahasiswa selalu dihantui

⁷ Suharsih & Ign Mahendra K, *Op.cit.*, hal. 127.

subversi rezim. Isu yang diangkat pun sebatas isu-isu lokal-nasional. Hanya beberapa aktivis mahasiswa yang ikut menanggapi isu-isu internasional, yaitu dari kalangan muslim. Itu pun sebatas aksi solidaritas terhadap apa yang menimpa ummat muslim di Negara lain. Seperti aksi yang dilakukan Forum Komunikasi Mahasiswa Islam Jakarta (FKMI) tahun 1994, yakni sebagai solidaritas terhadap apa yang menimpa kaum muslim di Bosnia.⁸

Pasca reformasi 1998, gerakan mahasiswa seolah menemukan ruangnya, di mana mereka dengan bebas menggelar mimbar-mimbar publik. Bisa dibayangkan artikulasi gerakan mahasiswa dalam berbagai isu politik hampir selalu menggunakan demonstrasi jalanan, termasuk dalam menanggapi isu-isu internasional dan kebijakan luar negeri Indonesia sendiri. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya demonstrasi yang dilakukan mahasiswa sebagai bentuk sikap atas isu-isu internasional tertentu. Tentu saja isu yang menjadi perhatian mereka memiliki keterkaitan erat dengan basis ideologis yang membentuk modus gerakan.

Ketika Amerika dan sekutunya menginvasi Irak tahun 2003 dan Afganistan sebelum itu, gelombang demonstrasi mahasiswa mengecam aksi tersebut ramai terjadi. Para mahasiswa melakukan aksi di beberapa kota besar sepanjang tahun 2003. Bahkan setelah empat tahun invasi tersebut, beberapa kelompok mahasiswa masih melakukan aksi menuntut militer AS segera angkat kaki dari Irak. Aksi ini juga kerap menuntut pemerintah untuk segera memutuskan hubungan dengan AS, karena dinilai sangat merugikan Indonesia dengan

⁸ ...

banyaknya sumber alam yang dikuasai perusahaan asing, seperti PT Freeport, PT Newmont, PT Exxon Mobile Oil serta PT Caltex.⁹

Isu yang juga selalu mendapat respon dari mahasiswa adalah pertemuan forum ekonomi dunia *World Trade Organization* (WTO). Ketika WTO mengadakan sidang pada tanggal 27-30 Juli 2004 di Jenewa misalnya, berbagai kelompok mahasiswa melakukan demonstrasi di Jakarta menentang pertemuan tersebut, yang menurut mereka ikut menggagas kebijakan yang merugikan Negara-negara miskin.¹⁰ Bahkan ketika Dirjen WTO, Pascal Lamy, datang ke Indonesia pada 20-21 Februari 2007 lalu, ratusan mahasiswa bersama kelompok masyarakat lainnya, seperti Federasi Serikat Petani Indonesia, Aliansi Buruh Menggugat, Koalisi Anti Utang, Barisan Rakyat Kuningan dan Perjuangan Pemuda Indonesia, melakukan demonstrasi di depan Istana Merdeka. Mereka menolak kedatangan Pascal Lamy karena WTO dinilai menyengsarakan rakyat dan petani.

Awal tahun 2006, terjadi gelombang demonstrasi mahasiswa di beberapa kota di Indonesia menentang pemuatan karikatur Nabi Muhamad SAW oleh salah satu surat kabar di Denmark. Demonstrasi yang digalangi gerakan mahasiswa Islam, seperti Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM), Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI), Pelajar Islam Indonesia (PII) dan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) ini, bahkan sampai menuntut pemerintah Indonesia memutuskan hubungan

⁹ Baca *Kompas*, Edisi 21 Maret 2007.

¹⁰ Baca "Setelah Mahasiswa Gagal, D... B... WTO...".

diplomasi dengan Denmark.¹¹ Demonstrasi atas isu yang lain juga terjadi September 2007 lalu. Beberapa kelompok mahasiswa di Jakarta menggelar demonstrasi mengecam kekerasan yang dilakukan Junta Militer Myanmar terhadap para biksu dan masyarakat yang berunjuk rasa.¹²

Salah satu isu yang selalu mendapat perhatian besar dari beberapa kelompok mahasiswa, adalah isu konflik yang terjadi di Timur Tengah antara Israel dan Palestina. Konflik yang sudah terjadi selama empat dekade tersebut mendapat perhatian serius, khususnya dari kalangan gerakan mahasiswa Islam seperti HMI, KAMMI, IMM, PII maupun PMII. Hal ini disebabkan karena adanya kedekatan psikologis antara kelompok mahasiswa Islam ini dengan isu konflik tersebut, di mana konflik yang sudah berlangsung selama empat dekade tersebut banyak melibatkan umat muslim di kedua Negara, terutama Palestina. Apalagi dalam kasus ini, Palestina menjadi korban atas arogansi Israel yang mencaplok sebagian wilayahnya. "Islamisasi" konflik Israel-Palestina membuat gerakan mahasiswa, yang memiliki basis ideologi Islam ini, terpancang untuk terlibat. Berbagai demonstrasi pun mereka lakukan untuk mendukung warga muslim Palestina sekaligus mengecam kolonisasi yang dilakukan Israel.

Hampir setiap tahun, ketika situasi konflik Israel-Palestina kembali memanas, gerakan mahasiswa Islam selalu memberikan perhatian dengan melakukan aksi solidaritas. Sepanjang tahun 2006 saja misalnya, ketika konflik Israel-Palestina memanas dan serangan Israel meluas hingga ke Lebanon, aksi solidaritas mahasiswa Islam terjadi di seluruh Indonesia. Hal ini menunjukkan

besar seperti Jakarta, Medan, Yogyakarta, Padang, Malang, Surabaya, Pontianak serta Balikpapan. Afiliasi mereka jelas: mendukung perjuangan masyarakat muslim Palestina menjadi Negara berdaulat, dan mengecam aksi kesewenangan Israel serta keterlibatan Amerika.¹³

Demonstrasi menyikapi konflik Israel-Palestina juga sering dilakukan di depan Kedutaan Besar AS, dengan meneriakkan kecaman terhadap Israel, AS, dan PBB yang dinilai turut bertanggung jawab atas memburuknya situasi di Timur Tengah. Dalam aksinya, para mahasiswa juga kerap menyerukan masyarakat, khususnya umat Islam Indonesia dan Negara lain untuk memboikot seluruh produk buatan AS dan Israel, serta Negara-negara Eropa lainnya yang mendukung agresi Israel.¹⁴

Dalam setiap demonstrasinya, para mahasiswa Islam tidak hanya mengecam Israel dan AS, tetapi juga menuntut pemerintah Indonesia sendiri untuk tegas menunjukkan sikap politik luar negerinya terhadap konflik tersebut. Selama ini, aksi-aksi yang dilakukan mahasiswa menunjukkan kekecewaan mereka terhadap sikap pemerintah yang dinilai kurang tegas menyikapi agresi Israel.¹⁵ Padahal, selain menyangkut solidaritas sesama muslim, konflik ini juga menyangkut agresi-kolonisasi yang dilakukan Israel. Dan sikap Indonesia seharusnya jelas, yakni menentang setiap tindakan penjajahan sebagaimana yang tertuang dalam UUD 45.

¹³ *Kompas*, Edisi 05 Agustus 2006. Baca juga "Demo Biadab Melawan Israel yang 'Biadab'", <http://www.metrotvnews.com/berita.asp?id=21843> [06/11/2007].

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ *Suara Merdeka*, Edisi 08 Agustus 2006 melalui <http://www.suaramerdeka.com/harian/0608/08/nas18.htm> [06/11/2007]

Melihat sikap pemerintah yang kurang tegas dalam menunjukkan politik luar negerinya terhadap konflik Israel-Palestina, pada tahun 2004 sebelum pemilu Presiden putaran kedua, beberapa elemen mahasiswa Islam seperti KAMMI dan HMI bahkan menyerukan agar dua calon Presiden yang maju ke putaran kedua (SBY dan Megawati) memaparkan visi politik luar negeri mereka. Mereka (baca: mahasiswa) mendesak, siapapun yang terpilih nantinya harus berani bersikap tegas terhadap Israel yang mereka nilai sebagai Negara teroris dunia.¹⁶

Melihat berbagai kekecewaan mahasiswa, khususnya gerakan mahasiswa Islam terhadap kebijakan luar negeri Indonesia dalam kasus Israel-Palestina, menimbulkan sebuah kesimpulan perseptual: terdapat persoalan dalam kebijakan luar negeri Indonesia, khususnya dalam artikulasi kepentingan Islam yang seharusnya menjadi perhatian pemerintah, karena umat muslim merupakan penduduk mayoritas, selain itu Indonesia juga merupakan Negara dengan penduduk muslim terbesar di Dunia.

Masyarakat muslim Indonesia seolah memiliki legitimasi untuk ikut mendamaikan konflik yang banyak melibatkan penduduk muslim di dua wilayah tersebut. Karena sentimen persaudaraan sesama muslim selalu mengemuka dalam permasalahan ini. Seolah konflik yang terjadi adalah antara Yahudi melawan Islam. Inilah yang semakin menguatkan situasi politik domestik untuk turut serta dalam proses penyelesaian konflik. Tak jarang publik memberikan perhatian terhadap isu ini dalam porsi yang cukup besar; melalui opini, pernyataan sikap, serta demonstrasi jalanan.

¹⁶ *Koran Tempo*, Edisi 31 Juli 2004.

Selain faktor “Islamisasi” konflik, keterlibatan publik serta pemerintah Indonesia dalam kasus Israel-Palestina juga didorong sikap politik luar negeri yang bebas-aktif. Kata “aktif” menunjukkan bahwa politik luar negeri Indonesia tidaklah pasif dan mengambil sikap netral dalam menghadapi permasalahan-permasalahan internasional. Pembukaan UUD 45 secara jelas menuntut Indonesia untuk menentang segala bentuk penjajahan dan ikut memajukan perdamaian dunia.¹⁷ Dalam konteks konflik Israel-Palestina, sikap Indonesia seharusnya sudah jelas: mendukung perjuangan bangsa Palestina untuk mencapai kemerdekaan dan menolak agresi Israel, serta mendukung upaya terwujudnya perdamaian.

Namun demikian, sikap politik luar negeri Indonesia terkadang tidak selalu sesuai dengan harapan masyarakat. Tidak sedikit yang menilai sikap pemerintah masih lemah dan belum menunjukkan kemandiriannya. Apalagi melihat sikap pemerintah yang cenderung *plin-plan* terhadap Israel. Banyak yang menduga hal ini karena kuatnya tekanan Amerika. Terutama intervensinya melalui tangan lembaga-lembaga keuangan internasional.

Selain itu, munculnya berbagai sikap pro-kontra masyarakat, terutama demonstrasi-demonstrasi mahasiswa Islam menuntut ketegasan pemerintah, lebih dikarenakan adanya benturan antara publik (terutama Islam) dan pemerintah dalam mengidentifikasi identitas kebijakan terhadap Palestina. Khususnya dalam artikulasi kepentingan masyarakat muslim Indonesia. Fakta bahwa Indonesia adalah Negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, belum mampu dimaknai sebagai variabel yang mempengaruhi kepentingan nasional dalam sikap

¹⁷ Mochtar Kusumaatmaja, *Politik Luar Negeri Indonesia dan Pelaksanaannya Dewasa Ini*, Bandung, Penerbit Alumi, 1983, hal. 7. Lihat juga Dewi Fortuna Anwar, *Hatta dan Politik Luar*

luar negeri Indonesia terhadap konflik Israel-Palestina. Hal inilah yang kemudian menimbulkan gelombang demonstrasi serta kekecewaan masyarakat dan mahasiswa Islam terhadap kebijakan luar negeri Indonesia.

Dengan berbagai argumen yang telah penulis paparkan, Skripsi ini kemudian mencoba melihat seperti apa sebenarnya persepsi yang terbangun dalam gerakan mahasiswa Islam dalam melihat politik luar negeri Indonesia terhadap konflik Israel-Palestina pasca reformasi. Terutama menyoroti kemandirian politik sebagaimana haluan politik bebas aktif, serta persoalan artikulasi kepentingan Islam dalam kebijakan luar negeri tersebut.

Gerakan mahasiswa Islam sengaja penulis pilih, karena kelompok mahasiswa inilah yang memberikan respon cukup besar terhadap situasi konflik Israel-Palestina. Hal ini bisa dilihat dari isu-isu yang mereka angkat serta kuantitas demonstrasi yang mereka lakukan. Bisa dibayangkan, konflik Israel-Palestina menjadi salah satu isu penting bagi gerakan mahasiswa Islam. Dalam penelitian ini, penulis akan membatasi kajian terhadap lima gerakan mahasiswa Islam, yaitu: HMI-DIPO, HMI-MPO, IMM, KAMMI, dan PMII.

Dalam melihat kebijakan luar negeri Indonesia terhadap konflik Israel-Palestina, penelitian ini sengaja mengambil batasan waktu pasca reformasi politik 1998. Karena pasca otoriter inilah ruang demokrasi dan kebebasan menyuarakan pendapat terbuka lebar. Sehingga hal ini memudahkan dalam melihat seperti apa agregasi yang dilakukan pemerintah terhadap kepentingan masyarakat muslim,

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang penulis eksplorasi di atas, maka rumusan masalahnya adalah: "*Bagaimana persepsi gerakan mahasiswa Islam terhadap politik luar negeri Indonesia, dengan melihat kebijakan luar negeri pemerintah Indonesia terhadap konflik Israel-Palestina pasca reformasi?*"

C. Kerangka Teori

Untuk mengeksplorasi lebih jauh persoalan yang akan dibahas dalam skripsi ini, penulis memerlukan beberapa kerangka dasar teori dan konsep yang sekiranya dapat mendukung penelitian ini, di antaranya:

Teori Persepsi

Studi tentang Persepsi pada awalnya memang dirintis oleh kelompok ahli hubungan internasional. Dalam hal ini, tokoh yang paling terkemuka adalah Robert Jervis. Dalam bukunya yang terbilang klasik, *Perception and Misperception in International Politics* (1970), Jervis menguraikan bagaimana para pengambil keputusan begitu mudahnya terjebak dalam persepsi atau mispersepsi yang salah. Karena persepsi yang salah, kebijakan yang diambil pun bisa salah. Ia memberi contoh, bagaimana sebelum Perang Dunia II, sejumlah pengambil keputusan di Barat kurang memperhitungkan potensi Adolf Hitler

lebihkan kekuatan Uni Soviet. Kedua-duanya, menurut Jervis, yang kemudian ikut menjadi sebab timbulnya peperangan.¹⁸

Dalam perjalanannya, teori persepsi kemudian dikembangkan menjadi aneka cabang. Salah satu yang paling terkenal dan paling populer adalah yang disebut *Enemy Images*. David Finlay (1967) misalnya, mengatakan bahwa citra musuh itu sering muncul dalam hubungan antarbangsa. Misalnya, memandang sebuah negara sebagai musuh, lalu atas dasar pandangan ini rakyat dimobilisasi untuk memusuhi negara tersebut.¹⁹

Hal ini bisa kita lihat pada kasus invasi Amerika Serikat dan sekutunya ke Irak tahun 2003. Persepsi para pengambil kebijakan AS yang memandang Saddam Husein sebagai pemimpin berbahaya, memberikan peluang mereka mencari celah untuk segera menjatuhkan Saddam dari kekuasaannya. Opini publik Amerika serta dunia pun dimobilisasi untuk ramai-ramai menunjuk hidung Saddam dan Irak sebagai Negara "terror". Isu adanya senjata pemusnah massal pun digunakan tersebut justru menjadi bomerang bagi AS sendiri. Persepsi yang hampir serupa pun bisa dilihat dari kasus Korea Utara, di mana persepsi para pemimpin AS yang menganggap Korea Utara sebagai Negara yang masuk catatan hitam dan bisa mengancam ideologi demokrasi dan kapitalisme, telah membentuk pandangan yang salah terhadap Negara tersebut. Persepsi dunia pun digiring untuk memandang Korea Utara dari sudut pandang sebagai pengancam stabilitas kawasan, karena itu perlu didisolasi.

¹⁸ "Jangan Hanya Hubungan Antarnegara", Fokus, *Kompas*, Edisi 24 Januari 2004.

¹⁹ *Ibid.*

Hal ini sesungguhnya menggambarkan bagaimana persepsi akan sebuah bangsa terbentuk, yang dicitrakan oleh segelintir elit dan pemimpin negara terhadap potensi kawan maupun lawan Negara mereka. Jika kita telaah, persepsi nasional setiap Negara tidak lepas dari faktor sosio-historis dan informasi yang mereka peroleh. Dalam pembentukan persepsi tersebut, informasi dan data yang mereka konsumsi sangat mempengaruhi jenis persepsi yang akan mereka pilih. Selain itu, setting geopolitik yang melatari sebuah entitas masyarakat juga sangat mempengaruhi terbentuknya sebuah persepsi.

Selain Robert Jervis dan David Finlay, akademisi Hubungan Internasional yang telah melakukan teoritisasi persepsi adalah Walter S. Jones dan juga K.J. Holsti. Dalam bukunya *The Logic of International Relations* (1988), Jones memaparkan secara analitis pembentukan persepsi dan isi persepsi dari negara-negara besar dalam politik dunia, seperti Uni Soviet, Amerika Serikat, China dan Negara dunia ketiga, yang saling berbenturan sehingga menimbulkan gejolak politik dunia.

Untuk memahami lebih jauh tentang persepsi, mari kita lihat kerangka persepsi yang dipaparkan Jones. Ia membedakan tiga komponen persepsi: nilai, keyakinan, dan pengetahuan.²⁰ Ketiga komponen inilah yang akan membentuk persepsi seseorang, kelompok, maupun Negara.

Menurut Jones, nilai adalah preferensi terhadap pernyataan realitas tertentu dibanding realitas lainnya. Sebagai contoh, sehat lebih baik dari sakit; hijau lebih

²⁰ Walter S. Jones, *Logika Hubungan Internasional: Persepsi Nasional 1*, Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama, 1992, hal. 276. Tiga komponen yang membentuk persepsi ini juga dikemukakan K.J. Holsti dalam bukunya *Internasional Politics* (1983), yang diterbitkan ke dalam bahasa

indah dari biru; langsing lebih cantik dari gemuk. Nilai tidak mengacu pada apa yang ada, melainkan apa yang seharusnya ada. Nilai memberikan harga relatif kepada objek dan kondisi.

Keyakinan adalah sikap bahwa suatu deskripsi realitas adalah benar, terbukti, atau telah diketahui. Keyakinan sering didasarkan pada penerimaan informasi yang sebelumnya dari lingkungan (seperti kalimat: "Saya telah mendengar bahwa ..."), meskipun hal itu tidak sama dengan data itu sendiri. Ini adalah suatu pernyataan analitis yang menghubungkan satuan-satuan data ke dalam suatu pola "yang telah teruji". Menurut Jones, keyakinan tidak sama dengan nilai. Seseorang mungkin percaya bahwa komunisme akan memacu laju pertumbuhan ekonomi dan bahwa kapitalisme akan lebih baik menjanjikan perlindungan kebebasan individu. Keyakinan seseorang terbentuk dari nilainya yang menentukan mana yang lebih baik antara kapitalisme atau komunisme. Atau, mana yang lebih berharga, pertumbuhan ekonomi atau kebebasan pribadi?²¹

Adapun pengetahuan (atau: "tahu"), kata Jones, bersumber dari data atau informasi yang diterima dari lingkungan. Pengetahuan adalah unsur kunci dalam pembentukan dan perubahan sistem perseptual. Konsep perubahan persepsi seseorang atau persepsi nasional mengacu pada pengetahuan baru yang merombak keyakinan dan nilai. Sebagai contoh, jika kita hendak menyelenggarakan konferensi antar aktor utama Perang Dingin dalam upaya menghapus perbedaan dan kesalahpahaman di antara mereka, maka tujuan kita adalah mempengaruhi persepsi mereka dengan mengenakan informasi baru. Kita mencoba mengubah

²¹ *Ibid.*, hal. 277.

keyakinan dan nilai yang terlanjur dianut yang menyebabkan konflik, dengan cara memberikan data-data kognitif baru kepada masing-masing pihak.²²

Gerakan mahasiswa Islam, seperti HMI, IMM, KAMMI, ataupun PMII, dalam melihat realitas sosial politik tentu tidak bebas nilai. Mereka sangat dipengaruhi oleh sistem nilai yang terbangun melalui penanaman ideologi gerakan, serta keyakinan mereka terhadap nilai tersebut. Ditambah lagi ketika dihadapkan pada sebuah fakta (pengetahuan) tertentu, yang bisa jadi telah mengalami distorsi.

Sistem nilai yang terbangun pada gerakan mahasiswa Islam sangat jelas: ideologi berbasis keagamaan. Seluruh gerakan mahasiswa Islam ini, baik HMI, IMM, KAMMI, ataupun PMII, memiliki basis ideologi yang serupa, yakni Islam sebagai dasar serta strategi gerakan. Demikian juga dengan afiliasi gerakan, di mana mereka memiliki komitmen kuat terhadap isu-isu keislaman.

Karena itu, dalam penelitian ini, penulis menggunakan teori persepsi sebagai pisau analisis untuk membedah seperti apa pandangan dari gerakan mahasiswa Islam dalam melihat kebijakan luar negeri Indonesia terhadap isu konflik Israel-Palestina.

Konsep Gerakan Mahasiswa

Secara umum, gerakan mahasiswa bisa difahami sebagai sebuah kegiatan

kegiatan mahasiswa yang berorientasi pada kepentingan masyarakat luas.

dilakukan untuk meningkatkan kecakapan, intelektualitas, dan kemampuan kepemimpinan para aktivis yang terlibat di dalamnya.

Berbeda dengan gerakan sosial yang sudah umum digunakan dalam kajian ilmu sosial, konsepsi gerakan mahasiswa belumlah terlalu “baku”, karena term yang mengacu kepada aktivitas mahasiswa juga terkadang menggunakan sebutan aktivis mahasiswa.

Dalam pemahaman umum, kata “gerakan” selalu berasosiasi dengan berbagai tindakan yang dilakukan untuk merespon atau memberikan reaksi atas kondisi tertentu (realitas sosial)²³. Demikian halnya dengan gerakan mahasiswa. Walaupun pada awalnya hanya sebatas wadah untuk meningkatkan kecakapan, intelektualitas, dan kemampuan kepemimpinan para aktivis di dalamnya, namun gerakan mahasiswa kerap melakukan berbagai *movement* sebagai respon atas realitas sosial yang terjadi.

Gerakan mahasiswa memiliki basis massa yang jelas, karena proses kaderisasi dilakukan dengan rapi melalui pendidikan perkaderan. Gerakan mahasiswa juga memiliki ideologi gerakan, hal ini menjadikan setiap organisasi gerakan mahasiswa memiliki afiliasi sosial-politik yang jelas.

Dalam perkembangannya, gerakan mahasiswa kemudian tidak hanya sebatas melakukan aktifitas kampus, tetapi lebih dari itu, ikut terlibat dalam isu-isu politik dan bahkan menjadi salah satu kekuatan oposisi politik. Bisa dibayangkan, kini gerakan mahasiswa menjadi salah satu instrumen demokrasi yang cukup penting di samping partai politik, pers, maupun kaum cendekiawan.

²³ Mardiana, Timor, Gerakan Mahasiswa, Jember, 1998, hal. 10.

Gerakan mahasiswa juga ikut mengusung berbagai perubahan yang terjadi. Bahkan tak jarang gerakan mahasiswa menjadi ikon perubahan dalam setiap momentum sosial politik yang besar. Di Argentina, misalnya, tahun 1955 mahasiswa berhasil memaksa Presiden Juan Peron turun dari kekuasaannya yang tiran. Demikian juga dengan Perez Jimenez di Venezuela tahun 1985, Ayub Khan di Pakistan tahun 1969, Reza Pahlevi di Iran tahun 1979, Chun Doo Hwan di Korea Selatan tahun 1987, serta Ferdinan Marcos di Filipina tahun 1985.²⁴

Dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia, gerakan mahasiswa juga seringkali menjadi cikal bakal perjuangan nasional, seperti yang tampak dalam lembaran sejarah bangsa. Gerakan Mahasiswa bisa dibilang ikut memberikan pengaruh cukup besar dalam konstelasi politik nasional. Para aktivis mahasiswalah yang kemudian ikut membentuk opini publik dalam menentang Soekarno tahun 1966 dengan melakukan aksi besar-besaran. Peristiwa 3 Oktober 1966 merupakan tragedi tak terlupakan, di mana tujuh puluh mahasiswa yang berdemonstrasi mengalami luka berat setelah berhadapan dengan pasukan pengawal Istana Presiden. Di antaranya Zainal Zakse dari *Harian KAMI* dan A. Razak Manan dari *Mahasiswa Indonesia*, ketika keduanya mengikuti proses pengadilan Subandrio, bekas Waperdam Soekarno.²⁵

Demikian juga tahun 1970-an ketika para aktivis ini beramai-ramai menentang rezim Orde Baru. Contoh yang paling mutakhir dan selalu dibicarakan sebagai salah satu kesuksesan gelombang gerakan mahasiswa di Indonesia adalah

²⁴ Deni Al Asy'ari, "Merancang Modus Baru Gerakan Mahasiswa", *Kompas Jogja*, Edisi 19 Desember 2005.

²⁵ Baca Francois Raillon, *Politik dan Ideologi Mahasiswa Indonesia: Pembentukan dan*

reformasi politik 1998. Dengan kekuatan aksi massa dalam spektrum yang sangat besar, mahasiswa akhirnya mampu memaksa Soeharto mundur sebagai Presiden sekaligus mengakhiri periode politik Orde Baru.

Bisa dibilang gerakan mahasiswa telah muncul sebagai salah satu kekuatan politik, yang mau tidak mau harus diperhitungkan. Dalam konteks sikap gerakan mahasiswa Islam terhadap kebijakan luar negeri Indonesia atas konflik Israel-Palestina pun demikian. Dalam kasus Israel-Palestina, gerakan mahasiswa Islam memiliki afiliasi yang jelas: mendukung sepenuhnya perjuangan rakyat Palestina, dan menentang sikap kesewenang-wenangan bangsa Israel. Hal ini terlihat jelas melalui demonstrasi-demonstrasi jalanan yang mereka lakukan. Mereka pun tak segan-segan menuntut pemerintah bersikap tegas terhadap Israel dan Amerika. Bahkan mereka meminta dengan ekstrim kepada pemerintah untuk berani memutuskan hubungan diplomatik dengan Amerika (walaupun terdengar utopis), atau paling tidak memboikot seluruh produk Amerika yang masuk ke Indonesia.

Dengan kekuatan daya ubah yang dimiliki gerakan mahasiswa tersebut, membuat pemerintah seharusnya memperhitungkan keberadaan serta peran mereka. Sebab, sebagai gerakan yang berbasis pada kampus dan identik dengan gerakan intelektual dan moral, mahasiswa tidak memiliki batasan struktural dalam mengusung setiap idealisme gerakannya. Berbeda halnya dengan partai politik ataupun media massa yang masih berhitung secara matematis. Bahkan tidak sedikit mahasiswa yang rela mengorbankan studi kampusnya, serta menghadapkan nyawanya di depan bedil aparat yang represif.²⁶

²⁶ Deni Al Asy'ari, *Op.cit.*

Term “gerakan mahasiswa Islam” yang digunakan dalam penelitian ini memiliki makna yang sama dengan konsepsi “gerakan mahasiswa”. Hanya saja, sebagai bahan penelitian, di sini penulis secara khusus menggunakan beberapa organisasi mahasiswa yang memiliki basis ideologi Islam. Hal ini terkait dengan isu yang coba penulis angkat, yakni kebijakan luar negeri pemerintah terhadap konflik Israel-Palestina pasca reformasi. Gerakan mahasiswa Islam di sini lebih mengacu kepada organisasi-organisasi mahasiswa yang memiliki basis intelektual, afiliasi, serta akar ideologi yang dibangun berdasarkan ideologi Islam: seperti HMI-DIPO, HMI-MPO, IMM, KAMMI, dan PMII.

Teori Politik Luar Negeri

Sebagian besar studi mengenai politik internasional, pada kenyataannya didominasi oleh studi mengenai kebijakan (politik) luar negeri. Studi tersebut memusatkan perhatian pada deskripsi kepentingan, tindakan, dan unsur kekuatan Negara.

Banyak ilmuwan hubungan internasional yang kemudian melakukan kajian mendalam tentang proses politik luar negeri. Salah satunya adalah K.J. Holsti. Menurut Holsti, politik luar negeri suatu Negara merupakan tindakan atau gagasan yang dirancang oleh pembuat kebijakan untuk memecahkan masalah atau mempromosikan suatu perubahan dalam lingkungan—yaitu dalam kebijakan, sikap, atau tindakan Negara lain. Kebijakan luar negeri tersebut, sangat

Negara, siapa pembuat kebijakan, kepentingan nasional, serta aspirasi domestik (tekanan publik).²⁷

Lebih lanjut, Holsti mengatakan bahwa tingkat keterlibatan suatu Negara dalam berbagai bidang isu internasional, paling sedikit merupakan suatu ungkapan orientasi, umumnya terhadap bagian dunia lain. Yang kita maksudkan dengan orientasi adalah, sikap dan komitmen suatu Negara terhadap lingkungan eksternal dan strategi fundamentalnya untuk mencapai tujuan dalam dan luar negerinya, dan untuk menanggulangi ancaman yang berkesinambungan. Strategi atau orientasi umum suatu bangsa jarang diungkapkan dalam suatu keputusan, tetapi merupakan hasil dari serangkaian keputusan kumulatif yang diambil dalam upaya untuk menyesuaikan tujuan, nilai, dan kepentingan dengan kondisi dan karakteristik lingkungan domestik dan eksternal.²⁸

Tidak jauh berbeda dengan apa yang disampaikan Holsti di atas, William D. Coplin, berpendapat bahwa kebijakan luar negeri merupakan sebuah keputusan yang didahului oleh sebuah proses di mana ada tuntutan dari *domestic politics*, serta dengan melihat kemampuan dari kekuatan ekonomi dan militer. Faktor-faktor tersebut kemudian mempengaruhi para pembuat kebijakan, yang kemudian meramunya menjadi sebuah kebijakan luar negeri dalam merespon situasi internasional.

Dalam hal ini, kebijakan luar negeri Indonesia telah diatur secara jelas yaitu menganut politik "bebas-aktif". Prinsip ini didasarkan dari pikiran Mohammad Hatta yang dicetuskannya pada rapat KNPI (Komite Nasional

Indonesia Pusat) di Yogyakarta pada tanggal 2 September 1948.²⁹ Hatta mengatakan, “Indonesia harus tetap menjadi subyek yang berhak menentukan sikap sendiri, berhak memperjuangkan tujuan sendiri berdasarkan pada kekuatan sendiri”. Selain itu, Indonesia juga menolak segala bentuk penjajahan serta berkewajiban mendukung terwujudnya perdamaian dunia. Hal ini juga tertuang jelas dalam pembukaan UUD 45 pada alinea pertama dan kedua.³⁰

Sikap serta garis besar politik luar negeri Indonesia ini kemudian diatur juga dalam UU No. 37/1999 Tentang Hubungan Luar Negeri. Pada pasal 1 ayat (2) disebutkan, *Politik Luar Negeri adalah kebijakan, sikap dan langkah Pemerintah Republik Indonesia yang diambil dalam melakukan hubungan dengan Negara lain, organisasi internasional, dan subyek hukum internasional guna mencapai tujuan nasional*. Sementara dalam pasal 3 disebutkan, *Politik Luar Negeri menganut prinsip bebas aktif yang diabdikan untuk kepentingan nasional*.³¹ Dengan demikian, politik luar negeri Indonesia mempunyai landasan yang kuat, karena telah diatur secara jelas.

Namun demikian, dalam beberapa kasus politik internasional, kebijakan luar negeri sebuah Negara terkadang justru tidak mencerminkan kepentingan nasional serta *domestic politics*. Kebijakan yang dikeluarkan, sering berkembang secara acak, tanpa adanya hubungan nyata antara keputusan yang dicapai dan kebijakan yang mengakibatkan tercapainya tujuan bersama. Seperti yang pernah dikatakan seorang diplomat Inggris, “Kebanyakan keputusan penting sering dibuat

²⁹ Michael Leifer, *Politik Luar Negeri Indonesia*, Jakarta, Gramedia, 1986, hal. xvi.

³⁰ Mochtar Kusumaatmaja, *Op.cit.* hal. 6.

³¹ Lihat UU No. 37 Tahun 1999 Tentang Hubungan Luar Negeri, diakses melalui http://www.bkn.go.id/unit/bubun/kur/1000/27_00_16_00/1100007

bukan sebagai bagian dari kebijakan yang disepakati bersama dan berpandangan jauh, tetapi di bawah tekanan mendesak suatu krisis tak terduga.”³² Komentar ini merupakan kritik umum yang ditujukan pada kebijakan luar negeri banyak Negara—yaitu bahwa pemerintah tidak mempunyai kebijakan yang sebenarnya, melainkan hanya menanggapi prakarsa pihak lain. Mereka hanya memperhatikan pemecahan masalah apabila timbul masalah, tidak dengan merumuskan tujuan jangka panjang dan merumuskan alat untuk mencapainya.

Dalam hal ini, Paul Seabury mengatakan:

“Kebijakan terlalu sering merupakan produk kekuatan dan peristiwa acak, sembarangan atau bahkan irasional. Kebijakan tidak jarang juga merupakan hasil kompromi setelah menemui jalan buntu, rumusah kompromi yang tidak mudah. Sering apa yang tampak di permukaan sebagai bagian tindakan yang sudah selesai dari suatu bangsa yang mungkin disebabkan karena kebimbangan, keengganan atau ketidak-mampuan bertindak. Ia mungkin bukan kebijakan samasekali, tetapi hanya hanyut bersama peristiwa. Kadang-kadang kebijakan luar negeri adalah hasil kerelaan pasif terhadap tekanan politik dalam negeri yang kuat—dan dengan demikian hasil kekuatan politik yang bersaing dalam bangsa itu sendiri. Akhirnya, kebijakan mungkin merupakan hasil dari pelepasan pilihan dan penilaian rasional para negarawan dalam menghadapi tekanan dari luar yang kejam dan keras.”³³

Dalam kaitannya dengan kebijakan luar negeri Indonesia, penelitian ini ingin melihat sejauh mana kebijakan luar negeri Indonesia terhadap konflik Israel-Palestina sesuai dengan landasan UU dan mencerminkan agregasi kepentingan nasional. Hal ini bisa dilihat dari persepsi yang terbangun di kalangan mahasiswa Islam dalam melihat kebijakan pemerintah terhadap konflik Israel-Palestina.

³² Dikutip dari Anthony Sampson, *Anatomy of Britain*, New York, Harper & Row, 1962, hal. 311. dalam K.J. Holsti, *Op.cit.*, hal. 138.

³³ Paul Seabury, *Power, Freedom, and Diplomacy: The Foreign Policy of the United States of America*, New York, Random House, 1962, hal. 5, dan hal. 111.

D. Hipotesa

Penulis menyimpulkan beberapa hipotesa, sebagai berikut:

1. Kebijakan Luar Negeri Indonesia terhadap konflik Israel-Palestina pasca reformasi masih dipandang oleh gerakan mahasiswa Islam sebagai sikap yang lemah dan tidak mencerminkan kemandirian politik sebagaimana amanat politik bebas-aktif, karena masih cenderung tunduk kepada kepentingan Asing.
2. Gerakan mahasiswa Islam menilai pemerintah belum mampu melihat kepentingan nasional masyarakat Islam (yang mayoritas) sebagai landasan pijak serta variabel penting dalam merumuskan kebijakan luar negeri terhadap konflik Israel-Palestina.

E. Tujuan Penelitian

Secara umum, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seperti apa persepsi yang terbangun dalam gerakan mahasiswa Islam, seperti HMI, IMM, KAMMI, dan PMII dalam menyikapi kebijakan luar negeri pemerintah Indonesia atas konflik Israel-Palestina pasca reformasi. Penelitian ini juga sebagai upaya memperkaya kajian studi ilmu hubungan internasional secara empiris tentang hubungan antara gerakan mahasiswa dan politik luar negeri Indonesia. Secara khusus penelitian ini bertujuan sebagai upaya intelektual yang penulis lakukan setelah menempuh masa studi di Jurusan Ilmu Hubungan Internasional Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, sekaligus sebagai prasyarat untuk

F. Jangkauan Penelitian

Jangkauan penulisan dalam sebuah penelitian sangat diperlukan. Hal ini untuk menghindari adanya penyimpangan pembahasan dan pembuktian terhadap hipotesa dan pokok permasalahan yang telah diajukan. Lebih jauh, pembatasan dimaksudkan agar obyek penelitian menjadi jelas dan spesifik, agar permasalahan dan kajian tidak melebar dari wacana yang telah ditetapkan.

Dalam penelitian ini, penulis akan membatasi kajian pada lima gerakan mahasiswa Islam saja, yaitu: HMI-DIPO, HMI-MPO, IMM, KAMMI, dan PMII yang ada di Yogyakarta, dari tingkatan Cabang dan Daerah. Kelima gerakan ini dipilih karena merekalah yang cukup aktif dalam merespon isu konflik Israel-Palestina melalui beberapa demonstrasi. Yogyakarta sengaja dipilih sebagai tempat penelitian, karena di Kota ini aktivitas kelima organisasi mahasiswa Islam di atas cukup dinamis sehingga cukup untuk mewakili daerah yang lain, terbukti dengan keterlibatan mereka dalam beberapa aksi demonstrasi menyikapi berbagai isu, baik nasional maupun internasional. Terlebih lagi, Yogyakarta merupakan salah satu daerah di mana cabang organisasi-oraganisai mahasiswa Islam ini cukup besar, mengingat banyak di antara organisasi mahasiswa Islam ini lahir dan diprakarsai di Yogyakarta.³⁴

Penelitian ini juga akan membatasi masa kajian, yaitu kebijakan luar negeri Indonesia pasca reformasi 1998. Hal ini dikarenakan pada periode pasca

³⁴ HMI (Dipo) didirikan di Sekolah Tinggi Islam, kini Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta. Walaupun HMI MPO didirikan di Jakarta, namun banyak yang meyakini kelahiran tersebut dideklarasikan sejak adanya dua Cabang HMI di Yogyakarta. PMII didirikan di Surabaya, meskipun demikian, dideklarasikannya PMII tersebut merupakan prakarsa dari peserta Kongres IPNU di Kaliurang Yogyakarta pada bulan Maret 1960. IMM, walaupun didirikan di Jakarta, namun tidak bisa dilepaskan begitu saja dari Yogyakarta, karena Muhammadiyah sebagai organisasi yang menaunginya lahir dan besar di kota pelajar ini.

otoriter ini, lebih mudah untuk melihat proses politik serta keterlibatan mahasiswa dalam berbagai isu politik, baik lokal, nasional maupun internasional.

Secara periodik, penelitian ini akan mengkaji lebih jauh kebijakan-kebijakan luar negeri Indonesia pasca reformasi sejak terpilihnya Abdurrahman Wahid sebagai Presiden Indonesia menggantikan B.J. Habib, serta dilanjutkan dengan periode Megawati Soekarnoputri dan Soesilo Bambang Yudoyono. Periode Habib sengaja tidak menjadi bahan kajian, karena sifat kekuasaannya yang transisional dan sangat pendek (1998-1999) menjadikannya kurang bisa dianalisis secara maksimal. Terlebih pemerintah saat itu juga banyak disibukkan dengan isu-isu *domestic politics*, seperti persoalan demokratisasi, kebebasan pers, penyelesaian konflik horizontal, serta ancaman disintegrasi.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian *kualitatif* (deskriptif) dan *kuantitatif* (survei).

Penelitian deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu subyek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun kilas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.³⁵

Penelitian survai adalah penelitian yang mengambil sampel dari satu populasi dan menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpulan data pokok. Pada umumnya, yang merupakan unit analisa dalam penelitian survai adalah individu.³⁶ Dalam penelitian ini, unit analisisnya adalah individu-individu dari kelima organisasi gerakan mahasiswa Islam di atas.

Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *Purposive Sampling*, yakni pengambilan sampel yang bersifat tidak acak. Di mana sampel dipilih atas pertimbangan-pertimbangan tertentu dan berdasarkan tujuan penelitian.³⁷

Dalam hal ini, penelitian ini akan mengambil sampel dari individu-individu yang duduk sebagai pengurus organisasi, dengan asumsi bahwa mereka lebih aktif dalam kegiatan organisasi dan mengalami proses ideologisasi yang cukup merata, sehingga mereka dianggap cukup mewakili suara dari populasi yang ada.

Survai akan mengambil 100 (seratus) unit sampel, disebar merata kepada lima organisasi Islam (HMI-DIPO, HMI-MPO, IMM, KAMMI dan PMII) dengan mengambil masing-masing 20 responden di tiap organisasi agar besaran sampelnya merata, dengan asumsi bahwa jumlah kepengurusan di tiap tingkatan Cabang maupun Daerah berkisar antara 20 orang.

2. Jenis Data

Ada dua jenis data yang penulis gunakan. Yaitu data primer dan sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh dari responden, berupa keterangan

³⁶ Marsi Singaribun dan Sofian Effensi (ed), *Metode Penelitian Survei*, Jakarta, LP3ES, 1989, hal.

³⁷ *Ibid.*, hal. 169.

pihak-pihak terkait dengan masalah yang ada dalam penelitian ini.

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari hasil atau bahan-bahan dokumenter tentang obyek penelitian. Data sekunder diperoleh melalui *library research* (studi kepustakaan).

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Questioner

Merupakan metode pengumpulan data dari responden yang dilakukan melalui daftar pertanyaan, dengan maksud untuk digunakan.

b. Deep Interview

Merupakan metode pengumpulan data melalui wawancara mendalam dengan beberapa tokoh tertentu, misalnya Ketua Umum Dewan Pimpinan Daerah, Ketua Umum Pimpinan Cabang, Wakil Ketua Umum, atau Sekjend, yang mana dianggap mewakili dan bisa memberikan konfirmasi mendalam tentang obyek penelitian.

c. Studi Pustaka

Diambil dari buku, majalah, koran, website, dan lain-lain.

H. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan, penelitian skripsi ini terdiri dari beberapa bab dan sub bab yang akan diuraikan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

dilakukan, yang mana dari situ kemudian dapat disimpulkan rumusan masalahnya. Bab ini juga dilengkapi dengan beberapa sub bab yang menerangkan kerangka teori dan konsep yang digunakan dalam penelitian ini, hipotesa, tujuan penelitian, jangkauan penelitian, serta metode penelitian.

BAB II GERAKAN MAHASISWA ISLAM DALAM TRADISI POLITIK INDONESIA

Bab ini lebih memfokuskan kajian pada sejarah kemunculan serta keterlibatan politik gerakan mahasiswa Islam, seperti HMI, DIPO, HMI MPO, PMII, IMM dan KAMMI, baik di tingkatan politik nasional maupun dalam menyikapi isu-isu internasional. Selain itu, akan dikaji juga secara mendalam proses lahirnya gerakan mahasiswa (secara umum) sebagai salah satu aktor pro-demokrasi yang mulai tumbuh di tahun-tahun 1990-an, serta seperti apa kiprah gerakan mahasiswa (Islam secara khusus) dalam proses konsolidasi politik Indonesia modern. Keterlibatan aktivis mahasiswa Islam dalam menyikapi isu-isu internasional juga menjadi bagian dari bab ini.

BAB III POLITIK LUAR NEGERI INDONESIA TERHADAP KONFLIK ISRAEL-PALESTINA

Pada bab ini, penelitian akan mengambil fokus kajian pada kebijakan luar negeri Indonesia terhadap konflik Israel-Palestina pasca reformasi. Bab ini juga dilengkapi dengan analisa mendalam tentang proses awal terbentuknya prinsip dasar dan arah kebijakan politik luar negeri Indonesia.

determinan apa saja yang ikut menentukan arah politik luar negeri tersebut di kemudian hari. Selain itu, dalam menganalisis politik luar negeri Indonesia terhadap konflik Israel-Palestina pasca reformasi, pada bagian akhir dari bab ini akan dipaparkan lebih jauh kebijakan masing-masing periode kepemimpinan pasca reformasi, yakni mulai dari periode kepemimpinan Abdurrahman Wahid, Megawati Soekarnoputri, hingga Soesilo Bambang Yudoyono.

BAB IV PERSEPSI ATAS KEBIJAKAN LUAR NEGERI INDONESIA

Pada bab ini fokus kajian lebih diarahkan pada temuan dan hasil penelitian yang berusaha menjawab rumusan masalah, yang mana diambil dan diolah dari hasil survei yang dilakukan terhadap 100 (seratus) unit responden dari lima gerakan mahasiswa Islam dalam menyoroti kebijakan luar negeri pemerintah Indonesia terhadap konflik Israel-Palestina pasca reformasi. Selain itu, bab ini juga memuat analisis-analisis lain yang mendukung temuan dari penelitian ini, seperti pengaruh proses ideologisasi terhadap pembentukan persepsi aktivis mahasiswa, serta persepsi mereka terhadap konflik itu sendiri. Kajian pada bab ini juga didukung dengan analisis mendalam melalui *deep interview* para ketua cabang atau daerah dari kelima organisasi mahasiswa Islam yang menjadi obyek kajian penelitian ini.

BAB V KESIMPULAN

Dalam bab ini disajikan kesimpulan dari penelitian ini: